

TOLOK UKUR KEDAULATAN PENDIDIKAN DALAM EKONOMI GLOBAL

Oleh

Ma'ruf Zahran Sabran

SEJAK tahun 2020 gaung pasar bebas semakin nyaring terdengar. Bahkan beberapa produk dalam negeri sudah kalah saing dengan produk luar negeri. Pengrajin lokal terpinggirkan dengan beberapa alasan. Biaya produksi yang mahal sehingga tidak tertutupi dengan harga penjualan yang murah. Barang impor membanjiri pasar lokal di Indonesia. Dengan harga yang lebih murah, kualitas barang terjamin, dan penjualan online. Satu demi satu, pengusaha Indonesia berjatuh, dan banyak pengrajin "gulung tikar."

Alih generasi ke generasi semakin menyedikitkan penggunaan tenaga manusia. Dari masyarakat agraris ke masyarakat industri telah banyak memangkas tenaga buruh. Perusahaan dengan mesin telah menggantikan tenaga manusia. Kini, alih teknologi industri ke teknologi digital, tidak hanya memangkas tenaga manusia. Namun juga efisiensi waktu, tempat, tenaga, contohnya ATM. Dampaknya, banyak bank-bank yang "merumahkan" karyawan.

Konteksnya, jika pagar penjaga moralitas kedaulatan ekonomi nasional jebol oleh kekuatan ekonomi global. Maka Indonesia harus bersiap-siap menghadapi serangan ekonomi luar yang lebih dahsyat lagi. Apa yang terlihat di permukaan ibarat fenomena gunung es. Sebenarnya lebih parah lagi, tidak hanya menjual barang murah, tapi perusahaan sudah banyak dilelang karena menjadi agunan bank. Bank akan sulit melakukan lelang, karena kurang peminat. Menjadilah aset tersebut rongsokan besi bekas. Karena situasi ekonomi sulit, lebih baik bertahan dengan usaha yang telah ada daripada menambah usaha. Penambahan yang beresiko pailit karena pengaruh multi variabel. Seperti upah karyawan, ulah spekulasi, dan resesi ekonomi akibat perang.

Faktanya, ekonomi global berdampak terhadap sekolah dan perguruan tinggi. Indonesia berupaya mensejajarkan standar kualitas pendidikan dengan target capaian yang setara dengan pendidikan internasional berbasis ISO (Internasional Organization for Standardization). Tantangan bisnis tersendiri bagi sekolah dan perguruan tinggi, bahwa mereka tidak hanya unggul dalam pembelajaran dan perkuliahan, tapi juga unggul dalam tata kelola administrasi dan kemandirian anggaran. Berefek agar lulusan sekolah dan perguruan tinggi mendapat sambutan hangat di bursa kerja internasional. Ketika pasar bebas global sudah mempersyaratkan kesetaraan lulusan. Apakah ini kolonialisme pendidikan gaya baru untuk diberlakukan pada negara-negara miskin? Lalu, untuk siapa sebenarnya pendidikan dipersembahkan?

Ternyata, saat pendidikan yang awalnya dikelola secara sederhana. Ketika masuk ke ranah birokrasi mengalami culture-shock. Dahulunya, orang menuntut ilmu dengan membersihkan niat karena Allah SWT. Berorientasi supaya akidah lurus, ibadah diterima dan

berperangai mulia. Lalu diajarkan tauhid, fikih dan tasawuf. Namun kini, tuntutan lapangan kerja, mata pelajaran di sekolah menyesuaikan permintaan dunia kerja (link and match).

Dahulu, pemanfaatan narasumber dalam negeri, profesi guru dalam negeri menjadi kebanggaan. Memanfaatkan kekayaan dalam negeri untuk menghidupi keluarga. Tanpa tergantung kepada pihak luar. Bukti ketika resesi ekonomi dunia tahun 1997, rakyat Indonesia tidak terdampak. Justru setelah mulai pandai meminjam dana luar negeri (IMF), pelan tapi pasti mulai terperosok ke jurang tanpa ujung.

Indonesia akan dihormati masyarakat dunia dengan catatan. Mampu menghadirkan kemakmuran ekonomi dan mutu pendidikan bagi rakyat. Hari ini, kedua ranah tersebut sangat terpuruk. Namun tidak terlambat untuk memperbaiki kondisi. Meskipun harus menyusun kembali skema baru. Tata-ulang ekonomi dan pendidikan ibarat dua sisi mata uang. Maksudnya, membenahi ekonomi untuk pendidikan, dan membenahi pendidikan untuk ekonomi.

Misal, pemerintah daerah yang konsen membenahi pendidikan. Target lima sampai sepuluh tahun ke depan, mereka akan memanen hasil. Berupa terciptanya sumber daya manusia andal dari pemanfaatan pajak dan sumber daya alam yang tepat guna.

Akhirnya, lembaga pendidikan harus berani membuat terobosan. Tidak saja menjadi corong pemerintah, tapi juga menjadi kekuatan penyeimbang sebagai mitra yang jujur dalam menyampaikan kritik membangun. Pemerintah tidak boleh "membonsai" dunia pendidikan. Karena isi dari jiwa pendidikan adalah guru dan siswa. Di luar subjek itu, adalah pegawai administratif yang ditugaskan untuk membantu merealisasikan mutu pembelajaran di sekolah. Dirgahayu Pendidikan Nasional.